



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Bupati dan SKPD Diminta Transparan

PANDEGLANG, (KB).-

Komisioner Komisi Informasi (KI) Banten, Ade Jahran, meminta Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang baru, Irna Narulita-Tanto Warsono Arban mampu menjamin keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab, persoalan keterbukaan informasi publik merupakan kunci untuk menuju *good government*.

"Kami melihat ada aura semangat kerja cepat dimiliki Bupati Pandeglang saat ini, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Semua cita-cita dan harapan

itu semua bisa tercapai jika didukung oleh keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan UU No. 14/2008 tentang KIP," kata Komisioner KI Banten, Ade saat diskusi terbuka dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pandeglang, di sekretariat PWI Jalan Widagdo Pandeglang, Rabu (6/4/2016).

Dia mengatakan, UU KIP sebagai payung hukum dalam menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengam-

bilan suatu keputusan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

"Capaian kegiatan dan kinerja pemerintah patut diketahui masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan itu lewat publikasi. Paradigma pegawai harus diubah, dulu sebagai pihak yang harus dilayani, dan sekarang sebagai pelayan masyarakat. Kami yakin itu semua bisa tercapai, jika semua pihak berkomitmen, kepala daerah punya niat membangun yang ikhlas," ujarnya. (H-21)***